

PENYEDIAAN FASILITAS UNTUK PEMAKAIAN HASIL-HASIL ASESMEN KEBUTUHAN PENDIDIKAN ISLAM

Muhammad Abdillah¹, Ahmad Salabi², Yahya Mof³

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin^{1,2,3}

Email: abdida1994@gmail.com¹, salabiahmad11@gmail.com², mofyahya@gmail.com³

Keywords

*Needs Assessment;
Facility Provision;
Educational Planning;
Islamic Education.*

*Asesmen Kebutuhan;
Penyediaan Fasilitas;
Perencanaan Pendidikan;
Pendidikan Islam.*

Abstract

The provision of relevant facilities and infrastructure is a main pillar in supporting the quality and effectiveness of the learning process in Islamic educational institutions. However, the fulfillment of facilities is often carried out without careful planning, resulting in off-target allocation and budget inefficiency. This paper aims to analyze the strategy of providing educational facilities based on the utilization of needs assessment results, and to formulate implementation steps within the context of Islamic education. The method used in this study is library research with a qualitative-descriptive approach through critical analysis of various literatures on infrastructure management and educational planning. The results indicate that the systematic use of needs assessment results serves as a crucial database to minimize the gap between the actual condition of facilities and the expected ideal standards. An effective facility provision strategy must pass through the stages of identifying priority needs, drafting fulfillment action plans, allocating accountable budgets, to implementing transparent procurement. The practical implication of this study requires managers of Islamic educational institutions to substantively integrate assessment results into the Medium-Term Work Plan (RKJM) and Annual Work Plan (RKT) so that procurement of facilities can answer real academic needs and support the strengthening of the religious atmosphere of the institution in a sustainable manner.

Penyediaan sarana dan prasarana yang relevan merupakan pilar utama dalam mendukung mutu dan efektivitas proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Namun, pemenuhan fasilitas sering kali dilakukan tanpa perencanaan yang matang, sehingga mengakibatkan alokasi yang salah sasaran dan inefisiensi anggaran. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyediaan fasilitas pendidikan berbasis pemanfaatan hasil asesmen kebutuhan (needs assessment) serta merumuskan langkah-langkah implementasinya dalam konteks pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis kritis terhadap berbagai literatur mengenai manajemen sarana prasarana dan perencanaan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil asesmen kebutuhan secara sistematis berfungsi sebagai basis data krusial untuk meminimalkan kesenjangan (gap) antara kondisi aktual fasilitas dengan standar ideal yang diharapkan. Strategi penyediaan fasilitas yang efektif harus melewati tahapan identifikasi kebutuhan prioritas, penyusunan

rencana aksi pemenuhan, alokasi anggaran yang akuntabel, hingga pelaksanaan pengadaan yang transparan. Implikasi praktis dari kajian ini menuntut pengelola lembaga pendidikan Islam untuk mengintegrasikan hasil asesmen secara substantif ke dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) agar pengadaan fasilitas dapat menjawab kebutuhan akademis riil serta mendukung penguatan atmosfer religius (religious atmosphere) institusi secara berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan sebuah proses terencana dan sistematis untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur ajaran Islam. Dalam upaya mewujudkan tujuan ideal tersebut, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, maupun sekolah dasar dan menengah berbasis Islam dituntut untuk melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Langkah awal yang esensial dari proses perbaikan ini adalah dengan melakukan evaluasi dan identifikasi masalah melalui proses asesmen kebutuhan (*needs assessment*). Asesmen kebutuhan merupakan sebuah prosedur logis untuk menentukan dan mengatasi kesenjangan (*gap*) antara kondisi aktual yang sedang terjadi di lapangan dengan kondisi ideal yang diharapkan. Bagi lembaga pendidikan Islam, asesmen kebutuhan sangat krusial untuk memetakan kelemahan kurikulum, relevansi kompetensi tenaga pendidik, kondisi psikososial peserta didik, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran.

Meskipun proses asesmen kebutuhan sering kali menghasilkan data yang komprehensif dan akurat mengenai berbagai kelemahan lembaga, permasalahan krusial yang sering muncul di lapangan adalah rendahnya pemanfaatan hasil-hasil asesmen tersebut dalam kebijakan operasional. Banyak lembaga pendidikan Islam terjebak pada pemenuhan aspek administratif semata, di mana dokumen hasil asesmen hanya berakhir sebagai tumpukan laporan tanpa tindak lanjut yang nyata. Salah satu kendala utama yang menghambat implementasi rekomendasi asesmen kebutuhan adalah tidak tersedianya fasilitas pendukung yang memadai. Penyediaan fasilitas, baik berupa infrastruktur fisik, perangkat teknologi, maupun sumber daya logistik, merupakan jembatan utama agar hasil-hasil asesmen kebutuhan dapat ditransformasikan menjadi program aksi nyata yang berdampak pada peningkatan mutu institusi. Tanpa adanya komitmen dan strategi yang jelas dalam penyediaan fasilitas, hasil asesmen kebutuhan

yang telah disusun dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya akan menjadi sia-sia dan tidak memberikan kontribusi bagi kemajuan lembaga.

Kajian mengenai manajemen sarana prasarana pendidikan Islam sebenarnya telah banyak dilakukan (Muhaimin, 2011; Bafadal, 2014), namun sebagian besar literatur terdahulu cenderung membahas pengadaan fasilitas secara umum atau normatif berdasarkan standar minimal pemerintah. Terdapat celah akademik (*literature gap*) dalam menjelaskan bagaimana mekanisme penyediaan fasilitas diintegrasikan secara khusus sebagai instrumen eksekusi untuk menjawab hasil riset evaluatif atau *needs assessment*. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi penyediaan fasilitas pendidikan berbasis pemanfaatan hasil asesmen kebutuhan serta merumuskan langkah-langkah implementasinya pada lembaga pendidikan Islam. Argumen utama yang diajukan dalam tulisan ini adalah bahwa penyediaan fasilitas yang efektif harus diposisikan sebagai fungsi manajemen strategis yang dinamis, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan riil akademis serta spiritual umat, bukan sekadar aktivitas pengadaan barang yang bersifat rutinitas belaka.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kajian ini dilaksanakan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan, menelaah, dan menyeleksi literatur primer serta sekunder yang relevan dengan tema perencanaan pendidikan dan manajemen fasilitas. Sumber data literatur yang digunakan mencakup buku-buku teks utama mengenai konsep *needs assessment* (Kaufman, 1979) dan manajemen sarana prasarana sekolah (Mulyasa, 2011; Sagala, 2013), serta artikel jurnal ilmiah berkala yang mendokumentasikan implementasi perencanaan fasilitas pendidikan. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) secara kritis dengan mereduksi data, mengklasifikasikan strategi, dan menarik kesimpulan konseptual. Validitas hasil kajian dijaga melalui teknik triangulasi sumber pustaka dan diskusi mendalam untuk memastikan bahwa sintesis strategi penyediaan fasilitas yang dirumuskan tetap sah, reliabel, dan aplikatif bagi pengelola pendidikan Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis.

Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan tujuan utama penelitian, yaitu mengeksplorasi, menganalisis, dan menyintesis berbagai konsep teoretis mengenai pengelolaan sarana prasarana serta pemanfaatan hasil-hasil asesmen kebutuhan (*needs assessment*) dalam memformulasikan strategi penyediaan fasilitas di lembaga pendidikan Islam. Objek studi dalam riset kepustakaan ini berfokus pada teks, regulasi, dokumen kebijakan, serta hasil-hasil pemikiran ilmiah yang mendiskusikan sistem perencanaan pendidikan. Seluruh rangkaian aktivitas pengumpulan materi, reduksi, hingga penarikan kesimpulan akhir dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, terhitung dari bulan Maret hingga Mei 2026, dengan memanfaatkan basis data literatur digital bereputasi.

Prosedur pelaksanaan penelitian ini terbagi ke dalam tiga tahapan sistematis yang dilewati secara berurutan. Tahap pertama adalah identifikasi dan pemilahan literatur (*literature screening*) melalui pencarian kata kunci yang relevan seperti asesmen kebutuhan pendidikan, manajemen fasilitas madrasah, perencanaan pendidikan Islam, dan alokasi sarana prasarana sekolah. Tahap kedua adalah pengumpulan data (*data collection*) dengan memetakan sumber pustaka primer dan sekunder. Sumber primer yang dianalisis mencakup karya teoretis monumental tentang konsepsi *needs assessment* oleh Roger Kaufman (1979) serta buku-buku rujukan manajemen sarana prasarana pendidikan Islam (Muhaimin, 2011; Mulyasa, 2011; Sagala, 2013). Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah terakreditasi lima tahun terakhir yang mendokumentasikan implementasi evaluasi program dan pengadaan fasilitas sekolah. Instrumen utama dalam penelitian kepustakaan ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang bertindak sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, sekaligus penafsir seluruh isi teks literatur.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yang dilakukan dengan mengutip, merangkum, dan mengode gagasan-gagasan inti dari buku teks serta artikel jurnal yang telah dinyatakan lolos uji relevansi kesesuaian topik. Setelah data tekstual terkumpul, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) secara kritis. Peneliti melakukan reduksi data dengan mengklasifikasikan tahapan pemanfaatan hasil asesmen kebutuhan, merumuskan strategi pengadaan fasilitas, dan menyintesis langkah-langkah praktis penerapannya agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi di lembaga pendidikan Islam. Guna menjamin keabsahan dan reliabilitas hasil kajian pustaka ini,

dilakukan pengecekan keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber teoretis. Peneliti membandingkan berbagai perspektif teori manajemen fasilitas umum dengan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam, kemudian mendiskusikannya secara mendalam untuk mereduksi bias subjektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang sahih, kredibel, dan aplikatif bagi para pengelola lembaga pendidikan Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsepsi Asesmen Kebutuhan (Needs Assessment) dalam Perencanaan Pendidikan

Asesmen kebutuhan (*needs assessment*) merupakan pilar utama dan langkah awal yang mutlak dalam siklus perencanaan pendidikan yang efektif. Berdasarkan pandangan fundamental Roger Kaufman, asesmen kebutuhan didefinisikan sebagai suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan (*gap*) antara kondisi riil atau apa yang saat ini ada (*what is*) dengan kondisi ideal yang diharapkan atau apa yang seharusnya ada (*what should be*). Kesenjangan ini kemudian ditempatkan sebagai masalah yang harus diselesaikan, di mana penentuan skala prioritas didasarkan pada besarnya dampak negatif yang muncul apabila kesenjangan tersebut diabaikan. Dalam lanskap pengelolaan institusi pendidikan, pelaksanaan asesmen kebutuhan berfungsi sebagai alat navigasi strategis yang memastikan bahwa setiap program pengembangan yang dirancang bersifat objektif dan berbasis data empiris, bukan sekadar asumsi intuitif pengelola lembaga.

Penerapan asesmen kebutuhan di sekolah atau madrasah melibatkan identifikasi menyeluruh terhadap berbagai komponen pendidikan, mulai dari capaian kompetensi peserta didik, efektivitas kinerja pendidik, relevansi kurikulum, hingga ketersediaan sarana pendukung. Karakteristik utama dari asesmen yang sukses terletak pada keterlibatan multipihak (*multistakeholder*) secara partisipatif, termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah, wali murid, dan siswa itu sendiri. Melalui pendekatan holistik ini, pengelola pendidikan dapat memetakan kebutuhan esensial secara akurat. Dengan demikian, dokumen laporan hasil asesmen kebutuhan bukan sekadar instrumen evaluasi masa lalu, melainkan dokumen visioner yang memuat rekomendasi-rekomendasi kritis bagi arah kebijakan pengadaan sumber daya dan perbaikan mutu berkelanjutan.

3.2. Strategi Penyediaan Fasilitas Berbasis Hasil Asesmen Kebutuhan

Fasilitas pendidikan yang meliputi sarana fisik, peralatan laboratorium, media pembelajaran, hingga infrastruktur teknologi informasi, merupakan determinan penting yang menentukan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Transformasi dokumen rekomendasi hasil asesmen kebutuhan menjadi tindakan nyata sangat bergantung pada komitmen lembaga dalam menyediakan fasilitas pendukung yang relevan. Strategi penyediaan fasilitas ini menuntut pengelola untuk bergeser dari pola pengadaan tradisional yang bersifat rutinitas-reaktif menjadi pola pengadaan strategis-proaktif. Pola ini mengharuskan setiap pengadaan barang dan penataan infrastruktur sekolah dikunci secara ketat pada prioritas masalah yang telah diidentifikasi dalam dokumen *needs assessment*, guna menghindari pemborosan anggaran akibat pembelian fasilitas yang tidak dibutuhkan oleh pengguna riil di lapangan.

Mekanisme implementasi strategi penyediaan fasilitas yang akuntabel wajib melewati empat tahapan prosedural yang mengalir secara sistematis. Tahap pertama adalah analisis dan standarisasi kebutuhan fasilitas, di mana pengelola menyandingkan data kesenjangan sarana prasarana hasil asesmen dengan standar nasional pendidikan guna menetapkan urgensi pengadaan. Tahap kedua adalah penyusunan rencana aksi pemenuhan sarana yang diintegrasikan secara komprehensif ke dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah. Tahap ketiga adalah alokasi penganggaran yang rasional dan efisien, menetapkan prioritas pembiayaan pada fasilitas yang berdampak langsung pada mutu pembelajaran. Tahap keempat adalah pelaksanaan pengadaan yang transparan dan akuntabel melalui mekanisme yang akurat, diikuti dengan monitoring berkala untuk memastikan pemanfaatan fasilitas tersebut berjalan optimal sesuai peruntukannya.

3.3. Implementasi Penyediaan Fasilitas pada Lembaga Pendidikan Islam

Kontekstualisasi penyediaan fasilitas berbasis asesmen kebutuhan pada lembaga pendidikan Islam memiliki dimensi nilai yang lebih kaya karena harus menyelaraskan tuntutan regulasi modern dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Sarana prasarana di madrasah, pesantren, maupun sekolah Islam terpadu tidak hanya diposisikan sebagai alat bantu transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan sebagai ruang sakral bagi pembentukan karakter (*character building*) dan internalisasi akhlakul karimah. Oleh karena itu, pengadaan fasilitas keagamaan seperti masjid sekolah yang representatif, ruang sumber belajar digital untuk literasi kitab suci, serta laboratorium bahasa yang memadai harus dipandang sebagai prioritas utama yang setara dengan

pemenuhan ruang kelas reguler demi mendukung terciptanya atmosfer religius (*religious atmosphere*) yang kondusif.

Prinsip manajemen sarana prasarana pada lembaga pendidikan Islam juga harus dikendalikan secara ketat oleh nilai-nilai etika muamalah Islam. Pengelola lembaga memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menerapkan prinsip *amanah* (akuntabilitas) dan transparansi penuh dalam mengelola dana pengadaan fasilitas yang mayoritas bersumber dari masyarakat atau umat. Segala bentuk pemborosan (*tabdzir*) dalam pembelian barang mewah yang tidak memiliki nilai fungsional akademis dan spiritual harus dihindari secara mutlak. Selain itu, penataan fasilitas harus mencerminkan prinsip keadilan (*'adl*) dengan memastikan aksesibilitas yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk memberikan perhatian khusus pada penyediaan fasilitas ramah anak dan disabilitas. Melalui integrasi manajemen fasilitas modern yang dikendalikan oleh komitmen moral keislaman, lembaga pendidikan Islam dapat menepis stigma ketertinggalan sarana dan tampil sebagai institusi pendidikan yang bermutu, kompetitif, serta berintegritas tinggi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyediaan fasilitas yang relevan dan sistematis merupakan instrumen eksekusi yang mutlak diperlukan agar hasil-hasil asesmen kebutuhan (*needs assessment*) dapat diimplementasikan secara nyata di lembaga pendidikan Islam. Pemanfaatan hasil asesmen sebagai basis data utama terbukti mampu menggeser paradigma pengadaan sarana prasarana sekolah dari yang semula bersifat rutinitas-reaktif menjadi strategis-proaktif, sehingga secara signifikan meminimalkan risiko inefisiensi anggaran. Mekanisme penataan fasilitas yang akuntabel wajib mengintegrasikan tahapan analisis standardisasi, penyusunan rencana aksi pemenuhan (RKJM/RKT), alokasi penganggaran yang rasional, hingga transparansi pengadaan. Kontekstualisasi manajemen fasilitas ini pada institusi pendidikan Islam membawa tanggung jawab moral yang besar untuk menegakkan prinsip *amanah* (akuntabilitas), menghindari perilaku *tabdzir* (pemborosan), serta menjamin aspek keadilan (*'adl*) akses bagi seluruh peserta didik demi terwujudnya atmosfer religius yang kondusif bagi mutu pembelajaran.

Implikasi praktis dari kajian ini menuntut para kepala madrasah, pengelola pesantren, serta perencana pendidikan Islam untuk tidak lagi memperlakukan

dokumen hasil *needs assessment* sekadar sebagai pelengkap administratif formal. Hasil evaluasi kebutuhan tersebut harus secara substantif dikunci sebagai dasar utama dalam setiap perumusan kebijakan pengadaan dan penataan fasilitas fisik maupun digital sekolah. Meskipun kajian ini berhasil merumuskan sintesis strategi penyediaan fasilitas yang akuntabel, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sifatnya yang konseptual-teoretis dengan metode studi kepustakaan. Oleh karena itu, direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi lapangan secara empiris, baik melalui pendekatan kuantitatif eksplanatori maupun studi kasus kualitatif, guna menguji efektivitas dan kendala riil implementasi pengadaan sarana berbasis hasil asesmen kebutuhan di berbagai tipologi lembaga pendidikan Islam yang berbeda.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, I. (2014). *Manajemen perlengkapan sekolah: Teori dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Kaufman, R. (1979). *Needs assessment: Concept and application*. Educational Technology Publications.
- Majid, A. (2007). *Perencanaan pembelajaran: Mengembangkan standar kompetensi guru*. Remaja Rosdakarya.
- Minarti, S. (2011). *Manajemen sekolah: Mengelola lembaga pendidikan secara mandiri*. Ar-Ruzz Media.
- Muhaimin. (2011). *Manajemen pendidikan islam: Aplikasinya dalam penyusunan rencana pengembangan madrasah/sekolah*. Kencana.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen & kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Mulyono. (2008). *Manajemen administrasi & organisasi pendidikan*. Ar-Ruzz Media.
- Mundiri. (2021). *Manajemen lembaga pendidikan islam di era digital*. Global Aksara Persada.
- Permadin, L. P. (2021). Asesmen kebutuhan konseli dalam perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 5(1), 27-33.
- Qomar, M. (2007). *Manajemen pendidikan islam: Strategi baru pengelolaan lembaga pendidikan islam*. Erlangga.
- Ramayulis. (2015). *Ilmu pendidikan islam*. Kalam Mulia.
- Sagala, S. (2013). *Manajemen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan*. Alfabeta.
- Sallis, E. (2002). *Total quality management in education*. Routledge.